

**DAFTAR ISI**

<b>COVER .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah: .....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1. Secara Teoritis .....	8
1.4.2. Secara Praktis .....	9
1.5. Metode Penelitian Hukum.....	9

1.5.1. Tipe Penelitian.....	9
1.5.2. Pendekatan Masalah.....	9
1.5.3. Sumber Bahan Hukum.....	10
1.5.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	11
1.5.5. Analisis Bahan Hukum.....	12
1.6. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II4 KERJASAMA DOKTER DENGAN PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF) DALAM HAL PEMBERIAN OBAT YANG DAPAT DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI PERBUATAN PIDANA.....</b>	<b>14</b>
2.1 Kualifikasi Perbuatan Pidana.....	14
2.2 Kualifikasi Perbuatan Pidana dalam Kerjasama antara Dokter dengan Pedagang Besar Farmasi.....	19
2.3 Konsep Kerjasama Dokter dengan Pedagang Besar Farmasi Mengakibatkan Kerugian dalam Perbuatan Pidana.....	28
<b>BAB III PERTANGGUNGJAWABAN KERJASAMA ANTARA DOKTER DENGAN PEDAGANG BESAR FARMASI DALAM PERATURAN HUKUM DI INDONESIA.....</b>	<b>35</b>
3.1 Pertanggungjawaban Pidana.....	35
3.2 Pihak-pihak yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hubungan Dokter dengan Pedagang Besar Farmasi yang mengakibatkan kerugian.....	37

3.2.1. Pertanggungjawaban Dokter dalam Praktik Kerjasama antara Dokter dengan Pedagang Besar Farmasi .....	37
3.2.2 Pertanggungjawaban Pedagang Besar Farmasi dalam Praktik Kerjasama antara Dokter dengan Pedagang Besar Farmasi yang mengakibatkan kerugian pada Pasien.....	44
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
4.1 Kesimpulan.....	61
4.2 Saran.....	62
<b>DAFTAR BACAAN.....</b>	<b>63</b>

**DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1956 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42)

Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Tentang Hak Asasi Manusia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)

Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4431)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)

**Peraturan Menteri Kesehatan RI:**

PMK Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran

PMK No. 1148/MENKES/PER/VI/2011 Tentang Pedagang Besar Farmasi

PMK Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik (*E-Catalogue*)

PMK Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan

PMK Nomor 58 Tahun 2016 Tentang *Sponsorship* Bagi Tenaga Kesehatan

PMK Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 1148/MENKES/PER/VI/2011 Tentang Pedagang Besar Farmasi

**Keputusan Menteri Kesehatan:**

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3987/A/Sk/1973 Tentang larangan pedagang besar farmasi menjual obat langsung kepada Dokter-dokter, Dokter Gigi, dan Apoteker

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1191/Menkes/PSK/IX/2002 Tentang Perubahan atas Kepmenkes No.918/Menkes/Per/X/1993 Tentang Pedagang Besar Farmasi

**Keputusan Presiden:**

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1995 Tentang Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan

**Peraturan Pemerintah:**

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian

**Kode Etik:**

Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia (MKEK) dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI)

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi

Kode Etik IPMG Tentang Praktik Pemasaran Produk Farmasi di Indonesia Revisi September 2019

**Surat Edaran:**

Surat Edaran Nomor KF/MENKES/167/III/2014 Tentang Pengadaan Obat  
Berdasarkan Katalog Elektronik (*E-Catalogue*)